



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 029/13022009
HARI : JUMAT
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2009

DAFTAR ISI

| | | Halaman |
|------------|--|----------------|
| I. | INTERNASIONAL | |
| 1. | Hillary Dekati Kekuatan Asia | 3 |
| 2. | PM Thailand Berkunjung ke Indonesia Pekan Depan | 3 |
| 3. | EU deepens ties with ASEAN, appoints new envoys | 4 |
| 4. | Singapura Kirim Kapal Perang untuk Tumpas Bajak Laut | 5 |
| 5. | Dua WNI Hilang di Australia | 5 |
| 6. | Israel: Upaya Damai agar Berlanjut | 7 |
| II. | NASIONAL | |
| A. | POLITIK | |
| 1. | Indonesia Diminta Tak Deportasi Orang Rohingya | 7 |
| B. | EKONOMI | |
| 1. | Indonesia Selesaikan Investor Update Dalam Rangka Kenalkan GMTN | 8 |
| 2. | Investasi Asing Terancam Anjlok | 9 |
| 3. | Ministry proposes low duty on imported raw materials of textiles | 9 |
| 4. | Govt to focus on fishery diversification | 10 |
| 5. | Pemerintah Tak Akan Intervensi Blok Natuna | 11 |
| C. | SOSBUD | |
| 1. | "UE Ban" Dicabut Maskapai Indonesia Langsung ke Eropa | 12 |
| D. | HANKAM | |
| 1. | Pengamanan: Kawasan Perbatasan Terbelenggu | 12 |
| 2. | Bantu Identifikasi Korban Kebakaran, TIM DVI Polri Diberangkatkan ke Australia | 14 |

| | | | |
|----------------------------|----|---|----|
| | 3. | Keberangkatan KRI Dipenogoro ke Libanon Ditunda | 14 |
| E. HUKUM | | | |
| | 1. | Indonesia to extradite pedophile suspects | 15 |
| F. OLAHRAGA | | | |
| G. LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | 1. | Indonesia Sea Segera Dibentuk | 16 |
| III. ARTIKEL | | | |
| | 1. | Keamanan Nontradisional (Oleh Anak Agung Banyu Perwita) | 16 |
| IV. LAIN-LAIN | | | |
| V. EDITORIAL | | | |
| | 1. | Perbatasan yang Merana | 17 |

Jakarta, 13 Pebruari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL

:

1. Hillary Dekati Kekuatan Asia

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton akan menggelar kunjungan ke Asia pekan depan.

Kunjungan tersebut merupakan langkah pendekatan terhadap kekuatan-kekuatan di Asia dalam menghadapi krisis ekonomi global, perubahan iklim, dan persenjataan nuklir. Kemudian, dengan terpilihnya Jepang, Indonesia, Korea Selatan (Korsel), dan China, merefleksikan pencarian strategi jangka panjang untuk menghadapi perubahan dinamika dalam dunia politik, ekonomi, dan kekuatan militer.

Pendahulunya, Condoleezza Rice, mengawali kunjungan kerja ke Eropa dan Timur Tengah. Bagi Michael Green, mantan penasihat Asia pada pemerintahan George W Bush, langkah Hillary untuk fokus terhadap tantangan dan kesempatan di Asia adalah kebijakan tepat. Yakinlah, kata Green, krisis saat ini berkisar pada pasar keuangan global, Timur Tengah, Irak, Afghanistan, dan Iran.

"Tapi, sejarah akan menghakimi bahwa pemerintahan ini dan generasi kita telah mengalihkan kekuatan dan perhatian dari Barat ke Timur. Pasalnya, bersinarnya China dan India serta tumbuhnya kepercayaan diri dan perubahan politik dan sosial di negara-negara seperti Indonesia, Jepang, dan Korea," paparnya.

Tidak seperti di Timur Tengah dan Eropa, yang mengalami penurunan citra AS setelah invasi Irak pada 2003. Karena itu, para analis mengemukakan bahwa di Asia Presiden Barack Obama mendapatkan warisan posisi AS begitu kuat dari Bush.

The Chicago Council on Global Affairs menyatakan bahwa Hillary yang berkunjung ke wilayah Asia, tempat di mana AS menggunakan kekuatan lunak melalui ekonomi, diplomasi, budaya, lebih berpengaruh dibandingkan dengan kekuatan militer.

"Rencana kunjungan Hillary menunjukkan pemerintahan Obama ingin memperkuat berbagai tantangan di wilayah itu," ujar Thomas Wright, pemimpin Chicago Council. Green juga memperkirakan pemimpin diplomat AS itu akan fokus terhadap permasalahan krisis keuangan global dan memerangi perubahan iklim.

Selain itu, Hillary akan menghidupkan kembali negosiasi enam negara (AS, Rusia, China, Jepang, Korsel, dan Korea Utara) dalam perlucutan senjata nuklir Pyongyang. "Hillary memilih Jepang dalam kunjungan pertama ke Asia untuk menghaluskan bulu yang telah dia acakacak," kata Green.

Pasalnya, ketika Hillary berkampanye perebutan kursi kepresidenan AS dengan mengatakan bahwa hubungan dengan China harus diutamakan dibandingkan lainnya. Pejabat AS mengemukakan, Hillary akan berkunjung ke Asia bersama Todd Stern, delegasi khusus perubahan iklim, dan Christopher Hill, kandidat Duta Besar AS di Irak.

Di Tokyo, pakar hubungan internasional Jepang, Nicholas Szechenyi menuturkan, Hillary akan mendiskusikan masalah krisis global dengan pemimpin Negeri Sakura tersebut. Kemungkinan, Hillary akan berbagai pandangan untuk berkoordinasi mengenai po-sisi dan pendapat mereka sebelum G20 pada April mendatang di London.

Sepertinya dalam kunjungan tersebut, Jepang akan memberikan pendapat penting mengenai dua warga negaranya yang diculik Korea Utara (Korut) selama Perang Dingin. Selain itu, perihal nuklir Korut juga akan didiskusikan lebih detail yang memicu ketegangan internasional.

Szechenyi mengungkapkan, Hillary akan mendiskusikan Pyongyang dalam kunjungannya ke Korsel. Hillary memilih Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara dalam kunjungan itu. Pakar Asia Tenggara James mengemukakan, Hillary akan meletakkan dasar untuk transformasi hubungan dan mitra kerja sama strategi dengan negara umat Islam terbesar di dunia. (Koran Sindo)

2. PM Thailand Berkunjung ke Indonesia Pekan Depan

Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva akan berkunjung ke Indonesia pada 20 Februari 2009 pekan depan. Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan akan menghadiri KTT ASEAN di Hua Hin, Thailand 27-28 Februari 2009.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya usai bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/2).

"Mengingat Indonesia dan Thailand akan merayakan hubungan kedua negara ke-60, kami akan terus menjalin hubungan di segala aspek termasuk ekonomi, pendidikan dan budaya, investasi, politik, dan keamanan," kata Kasit kepada wartawan.

Dalam pertemuan itu juga dibahas beragam kemungkinan kerja sama untuk mencapai tujuan dalam kerangka menjalankan Piagam ASEAN yang baru, terutama keinginan dan niat tulus untuk menjadikan asosiasi ASEAN sebagai sebuah komunitas. Kasit juga menyatakan pentingnya dukungan dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara demokratis untuk memajukan ASEAN. "Tidak hanya kemajuan sosial di bidang ekonomi, tapi juga dalam pengembangan penegakan hukum, tata kelola pemerintahan dan nilai-nilai hak asasi manusia. Di mana Indonesia telah berhasil mentransformasikan diri dan memimpin sebagian negara ASEAN," paparnya.

Saat disinggung mengenai masalah pengungsi Rohingya, Menlu Piromya mengaku, masalah ini tidak dibicarakan dengan Presiden, namun sudah didiskusikan dengan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda.

"Saya pikir, kita harus kembali ke Bali Process untuk mengatasi masalah ini. Kedua negara telah memiliki pengalaman dan instrumen dalam membicarakan secara komprehensif dan melakukan aksi nyata guna membantu orang-orang Vietnam. Kami berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara-cara yang tepat," paparnya.

Rabu pagi sebelumnya, Kasit mengadakan pertemuan dengan Menlu Hassan di Deplu, Pejambon, Jakarta. Pertemuan tersebut membicarakan berbagai masalah, terutama peningkatan hubungan bilateral, KTT ASEAN, Thailand Selatan, kerja sama di bidang perikanan, serta masalah pengungsi Rohingya asal Myanmar.

"Dari kunjungan ini kita banyak menyerap informasi tentang prioritas kebijakan baru pemerintahan PM Abhisit, dan rancangan-rancangan yang dipikirkan Thailand selaku Ketua ASEAN untuk memajukan ASEAN," kata Menlu kepada wartawan usai pertemuan. "Pada intinya, kita membicarakan kerja sama bilateral," ungkap Teuku Faizasyah, Juru Bicara Deplu saat dihubungi SH, Kamis (12/2) pagi. Soal Rohingya, Indonesia menginformasikan pelaksanaan verifikasi yang telah dilakukan dan laporan mengenai perlakuan kasar yang diterima para pengungsi.

"Pemerintah Thailand menyatakan, mereka berterima kasih atas info tersebut," kata Faiza sambil menambahkan bahwa Pemerintah Thailand menyatakan mereka akan menyelidiki aspek-aspek HAM dalam perlakuan mereka terhadap Rohingya. Soal Thailand Selatan, kedua menlu saling berbagi informasi.

"Kita menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan dalam masalah Aceh," kata Faiza. Kamis pagi, Kasit menghadiri jamuan sarapan pagi oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan. Keduanya membahas peran penting Komite Perwakilan Permanen untuk ASEAN dalam menciptakan Komunitas ASEAN tahun 2015. Surin mengharapkan komite tersebut bisa dibentuk secepatnya. Pada kesempatan itu, Surin mengungkapkan wakil-wakil Laos dan Vietnam akan segera menyampaikan kredensialnya. (Sinar Harapan)

3. EU deepens ties with ASEAN, appoints new envoys

The European Union (EU), the world's most powerful regional organization, Thursday said all its 27 member countries and its executive arm European Commission (EC) will appoint ambassadors to the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) to strengthen relations between the two regional bodies.

"To deepen diplomatic relations, ambassadors from all 27 EU member states and the European Commission will be accredited to ASEAN," the Delegation of the European Commission to Indonesia stated Thursday.

The governments of Germany, Finland, the Czech Republic, the EU and the EC Thursday formally appointed their ambassadors based in Jakarta as their envoys to ASEAN.

"[Czech] Ambassador Pavel Rezac and German Ambassador Baron Paul von Maltzahn met with the ASEAN Secretary-General [Surin Pitsuwan] to submit their letters of appointment," the Czech Embassy's deputy head of mission Martin Kubecek told *The Jakarta Post* on Thursday.

Head of the EC Delegation to Indonesia Ambassador Julian Wilson and Finland's Ambassador to Indonesia Antti Koistinen also submitted their letters of appointment.

Britain and France have already appointed their ambassadors to ASEAN. The remaining EU members will appoint their envoys soon.

With the adoption of the historic ASEAN Charter, the ten-member regional organization is now not only a legally binding organization but also poised to advance regional cooperation and integration.

The EU, which also follows a similar path of regional integration, welcomed the new era in ASEAN's development.

"To show its continued commitment of support and partnership with ASEAN in this new phase,

the EU has now upgraded its diplomatic relations with ASEAN, expanded its development cooperation to ASEAN and strengthened its Jakarta-based team to help manage this expanded relationship," the EC delegation said.

The EC will also provide more than 50 million euro in the next three years to ASEAN to help realize the latter's goals as spelled out in the Charter.

Meanwhile, an official from the EC Delegation said the Commission has also appointed Jan-Willem Blankert as a special adviser for ASEAN affairs to strengthen the enhanced relationship between the two organizations. Blankert is based in Jakarta.

Surin welcomed the appointments of Czech, Finnish, Germany and the EC ambassadors as well as the upgrading of relations with the EU.

"We appreciate the European Union's move to further deepen relations with ASEAN following the entry into force of the ASEAN Charter on Dec. 15, 2008. It reflects the EU's commitment to engage ASEAN on all levels. The accreditation of ambassadors from all 27 EU member states and the EC to ASEAN will serve to strengthen the links between the two regions politically, economically and culturally," Surin said in a statement Thursday.

The EU's diplomatic representation to ASEAN will be conducted by a in a troika comprising the current EU presidency, the incoming EU presidency (Sweden) and the EC. (The Jakarta Post)

4. Singapura Kirim Kapal Perang untuk Tumpas Bajak Laut

Singapura akan mengirimkan pasukan angkatan lautnya ke Teluk Aden untuk bergabung pada masyarakat internasional dalam memerangi perompak kapal yang merajalela di lepas pantai Somalia.

Negara pulau ini akan mengirimkan satu kapal pendarat tank (LST) dan didukung dua helikopter Super Puma serta 200 personil angkatan laut pada periode tiga bulan tahun ini, menurut Menteri Pertahanan Teo Chee Hean kepada parlemen, Kamis (12/2).

Dia mengatakan, kapal tersebut yang akan bekerja dengan pasukan multinasional Pasukan Satuan Gabungan yang dipimpin Amerika Serikat (AS) akan melindungi jalur pelayaran kapal di Teluk Aden. Kapal itu siap melaksanakan operasi.

Menteri Teo mengatakan, sebagai satu negara maritim, Singapura menyatakan keprihatinan yang sama dengan masyarakat internasional berkaitan dengan merajalelanya perompakan, dan berkomitmen untuk membantu upaya-upaya internasional guna menjamin keamanan dan keselamatan jalur laut.

Teo mengatakan, masyarakat global hendaknya memainkan peranan mereka dalam menjaga jalur perkapalan internasional bagi siapapun yang menggunakannya, karena tak ada satu negarapun yang memanfaatkan jalur tersebut sendirian saja.

Pada tahun lalu, perompak-perompak Somalia menyerang lusinan kapal kargo dan kontainer termasuk satu supertanker, serta kapal yang penuh dengan tank-tank tempur, serta meminta uang tebusan sebesar 100 juta dolar AS. (Media Indonesia)

5. Dua WNI Hilang di Australia

Dua mahasiswa Indonesia, Rudi, 28, dan Dean Lesmana, 20, hilang dalam musibah kebakaran hutan dan semak belukar yang melanda negara bagian Victoria, Australia. Nasib keduanya hingga kemarin belum jelas.

Untuk sementara mereka dinyatakan sebagai korban hilang dalam musibah kebakaran yang telah menewaskan hampir 200 orang. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri belum dapat memberikan kepastian apakah dua WNI tersebut menjadi korban kebakaran atau tidak.

"Tapi kalau benar mereka ada di sekitar lokasi kebakaran, peluang lolosnya kecil," ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah di Jakarta kemarin. Teuku Faizasyah menambahkan, pihak Konsulat Jenderal RI di Melbourne beserta kakak korban telah pergi ke Alexandra Relief Centre untuk mendapatkan informasi seputar korban kebakaran itu.

"Tapi sampai sekarang belum ada perkembangan informasi terbaru," tandas Teuku Faizasyah. Rudi dan Dean Lesmana merupakan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Melbourne. Keduanya sedang berlibur di kota wisata Marysville, Victoria, salah satu wilayah yang luluh lantak akibat kebakaran hebat sejak Sabtu (7/2).

Berdasarkan paspor keduanya, mereka berasal dari Sumatera Utara dan Samarinda. Media Australia The Age kemarin melaporkan, Julianne The, 29, kakak Rudi, khawatir dengan nasib adiknya. Julianne menyatakan, adiknya sempat menelepon tim darurat menggunakan nomor 112, Sabtu (7/2). Dia mengaku mulai khawatir sejak Minggu (8/2) ketika Rudi dan Dean Lesmana tidak pulang.

"Saya menghubungi provider karena mereka menggunakan telepon (seluler) saya. Provider bilang, mereka telah menghubungi 112 selama satu menit pada 5.37 sore. Saya coba melacak lokasi menelepon. Namun provider bilang tidak dapat melakukannya," ungkap Julianne.

Menurut Julianne, Rudi dan Dean Lesmana merupakan mahasiswa jurusan bisnis memasak di William Angliss Institute tahun lalu. Mereka menggunakan mobil Honda Jazz meninggalkan Surrey Hills menuju Marysville untuk berlibur. "Mereka sangat gembira dapat bepergian dengan mobil, tapi tidak menyadari bagaimana panasnya wilayah itu.

Mereka tidak menyadari ancaman bahaya kebakaran itu," papar Julianne. Julianne dan Rudi telah tinggal di Melbourne selama 2 tahun. Julianne mengungkapkan, adiknya ingin berlibur dan mengabadikan beberapa wilayah di Australia sebelum dia mulai kerja di restoran Jepang di Toorak, Australia.

"Dia telah bekerja paruh waktu dan pihak restoran menawarinya sebuah pekerjaan mulai Selasa (10/2)," paparnya. Orangtua Rudi yang tinggal Jalan Sumatera, Kelurahan Belawan Dua, Kecamatan Belawan Dua, Medan masih shock dengan musibah yang menimpa anaknya. Hom Kim Hong, 46, ibu Rudi, enggan berbicara kepada wartawan yang mendatangi rumahnya kemarin.

Dengan nada suara pelan dan raut muka sedih dia mengatakan bahwa putranya masih hidup. Dia meminta wartawan untuk pulang dan jangan betanya lagi. "Aku minta tolong jangan tanyanya lagi," ucapnya. Aciu, 59, bapak Rudi, terlihat menunduk dan tutup mulut atas beberapa pertanyaan yang dilontarkan wartawan.

"Saya tidak tahu itu, tolong jangan ganggu kami dulu, kami ingin tenang," ujarnya. Sementara itu, kedua orangtua Dean Lesmana, yakni Sandi Satrio Lesmana Tan, 56, dan So Dju Tju, 49, berharap segera bertemu anaknya di Australia. Pasangan suami istri yang tinggal di Jalan Darmo Selatan Gang 18 No 14, Surabaya, ini hingga tadi malam masih percaya bahwa anaknya selamat.

Menurut Sandi Satrio, Dean tinggal bersama adik sepupunya, Wisnu, di 88 Park St Unit 22, South Melbourne. Dean yang lahir di Samarinda, 19 Desember 1982, pada Juni mendatang diperkirakan akan diwisuda. Pada Rabu (4/2), Dean berangkat ke Australia diantar keluarganya di Bandara Juanda Surabaya. Saat itu Dean berjanji menelepon orangtuanya di Surabaya setibanya di Melbourne.

Lalu pada Kamis (5/2) malam sekitar pukul 21.00 WIB Dean menelepon ke keluarganya di Surabaya. Waktu itu yang menerima telepon adalah adiknya, Doni Lesmana, 27. "Dia hanya mengabarkan sudah tiba di Australia dengan selamat. Setelah itu berencana ke luar kota untuk piknik bersama dengan Rudi, temannya.," paparnya dengan mata berkaca-kaca.

"Saya tidak merasakan firasat apa pun kalau akan ada bencana seperti ini. Tapi saya tetap yakin anak saya masih hidup. Apalagi lokasi kebakaran dengan tempat piknik anak saya terbilang jauh, sekitar 40 hingga 45 km," terangnya. Dia menduga, saat kebakaran terjadi, keduanya terjebak sehingga tidak bisa keluar.

Alat komunikasi yang mereka pegang (handphone) juga tak dapat dihubungi. Sementara So Dju Tju mengaku bersama suami dan anaknya di Surabaya akan segera berangkat ke Australia untuk mengetahui keberadaan Dean Lesmana.

Saat ini keduanya tengah mengurus visa. "Kalau tidak ada kabar juga mau bagaimana lagi, kami harus berangkat ke sana," terangnya. Dia juga berharap pemerintah membantu mencari anaknya.(Koran Sindo)

6. Israel: Upaya Damai agar Berlanjut

Washington, Kamis - Pemerintah AS dan Uni Eropa berharap Pemerintah Israel yang baru tetap melanjutkan upaya perdamaian Timur Tengah. Juru bicara di Dewan Keamanan Nasional AS, Michael Hammer, Rabu (11/2), berharap Israel tetap bekerja sama dalam mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina serta Israel dan negara tetangga lainnya.

Uni Eropa (UE) juga berharap Pemerintah Israel yang baru bisa mengupayakan terwujudnya negara Palestina yang mandiri serta memenuhi kewajiban mengupayakan perdamaian. Partai kanan yang kemungkinan akan kembali berkuasa dikhawatirkan bisa menghambat upaya perdamaian Timur Tengah. Juru bicara di Departemen Luar Negeri Perancis menyatakan, siapa pun partai yang menang di Israel harus bisa memperbarui komitmen perdamaian dan menghentikan proyek permukiman di Jerusalem timur.

Menteri Luar Negeri Belgia Karel De Gucht lebih terus terang. Menurut De Gucht, pemerintah baru Israel sebaiknya dipimpin oleh Menlu Israel Tzipi Livni daripada Benjamin Netanyahu yang ada di garis keras. "Saya kira komunitas internasional sependapat. Peluang meraih kesepakatan perdamaian Timteng juga lebih besar jika Israel ada di tangan Livni," kata De Gucht di stasiun radio VRT.

Pakar politik di AS memperkirakan, jika Livni menjadi PM Israel, dia terpaksa membangun pemerintah koalisi yang tak kondusif untuk proses perdamaian. Livni telah bertemu dengan tokoh partai ultra nasionalis, Avigdor Lieberman, membicarakan prospek koalisi. Namun, masalahnya, Lieberman yang memimpin partai terbesar ketiga, Yisrael Beitenu, dikenal kerap bersikap keras kepada Arab Israel.

Jika Netanyahu yang menjadi PM, banyak pihak yang khawatir proses perdamaian akan terhambat atau bahkan terhenti. Selama ini Netanyahu tidak bersedia berunding dengan Palestina membahas perdamaian. Jika Netanyahu bergabung bersama Lieberman, berbagai pihak khawatir pendekatan Israel ke negara-negara Arab akan semakin keras.

Suara tambahan

Dari pemilu, lebih dari 150.000 kartu suara—mayoritas ada di kamp militer, penjara, dan kedutaan besar Israel di berbagai negara—belum dihitung. Para pakar politik memperkirakan suara dari militer kemungkinan beralih ke kanan dan mendukung Partai Likud pimpinan Netanyahu.

Dari hasil penghitungan suara paling akhir, Partai Kadima (Livni) meraih 28 kursi, sementara Likud 27 kursi. Jika kedua kandidat berada di posisi yang sama-sama kuat, tergantung pada Presiden Israel Shimon Peres untuk memutuskan siapa yang menjadi PM Israel baru.(Kompas)

II. NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Indonesia Diminta Tak Deportasi Orang Rohingya

Pemerintah Indonesia diminta tidak mendeportasi para pengungsi asal Rohingya, Myanmar yang sejak awal Januari lalu terdampar di Sabang dan di Kuala Idi, Kabupaten Aceh Timur, Nanggroe Aceh Darusalam (NAD).

"Departemen Luar Negeri jangan mendeportasi para pengungsi muslim Rohingya dan tidak begitu saja menggolongkan mereka sebagai 'economic migrants'," ujar Ketua Tim Ukhuwah Jama'ah Muslimin (Hizbullah), dr Djoko Wiyono, SpKJ kepada ANTARA di Medan, Jumat (13/01).

Didampingi anggota Tim Hizbullah lainnya seperti Ustadz Amin Nuroni, Ustadz Rustam Efendi, Sudrajat dan Ahmad Irfansyah, ia juga meminta Pemerintah Indonesia membentuk tim

pencari fakta independen untuk menginvestigasi faktor penyebab terusnya muslim Rohingya itu dari negerinya.

Tim juga meminta pemerintah pusat dan Pemprov NAD untuk memberikan perlindungan, menyediakan tempat pengungsian, santunan sandang, pangan, pengobatan dan bantuan lainnya secara layak, terutama para pengungsi dari kalangan anak-anak dan orang tua.

"Tim juga menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemda Aceh Timur dan jajarannya serta masyarakat setempat baik individu maupun kelompok yang sampai detik ini telah dan selalu bersedia membantu para pengungsi," ujarnya.

Tim Ukhuwah Jama'ah Mislamin (Hizbullah) juga mengajak kepada para pimpinan ormas/orpol Islam, LSM dan segenap komunitas umat Islam dan warga dunia untuk memberikan dukungan dan bantuan moril maupun materil kepada kaum muslimin Rohingnya.

"Kami menyerukan kepada kaum muslimin di Indonesia dan di seluruh dunia untuk merapatkan shaf dalam satu kesatuan, sehingga umat Islam memiliki kekuatan untuk melindungi setiap jiwa muslimin dari segala bentuk kezaliman dan penindasan," kata Djoko Wiyono.

Tim Ukhuwah Jama'ah Muslimin Hizbullah juga telah memberikan bantuan kepada umat Islam asal Rohingnya yang terdampar di Kuala Idi Kabupaten Aceh Timur berupa paket obat-obatan, pakaian baru dan mushab Alqur'an.

Djoko Wiyono mengatakan, sebagai sesama umat Islam tidak bisa membiarkan saudaranya yang sedang tertimpa musibah mengalami penderitaan. "Kita wajib menolong dan membela dengan doa, harta dan jiwa," katanya.

Pada kesempatan itu ia juga mengatakan Jama'ah Muslimin (Hizbullah) memrotes dan mengecam tindakan Junta Militer Myanmar yang telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap umat Islam Rohingnya di Myanmar. Tindakan sewenang-wenang yang tergolong kejahatan kemanusiaan itu berupa intimidasi, kerja paksa, penyiksaan, penculikan, pengusiran, pemerkosaan hingga pembunuhan.

"Tindakan itu jelas bertentangan dengan HAM dan sangat melukai perasaan umat Islam sedunia," ujarnya. Tim Ukhuwah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) mendesak dunia internasional untuk menekan Pemerintah Myanmar agar memberikan hak hidup dan menjalankan keyakinan agamanya kepada muslimin Rohingnya serta mendesak negara-negara yang berada di sekitar Myanmar untuk melindungi dan memperlakukan para pengungsi dengan baik.

Djoko Wiyono mengungkapkan, kondisi para pengungsi Rohingnya di Kuala Idi saat ini sudah semakin membaik dan sejumlah pesantren juga sudah menyatakan kesediaan untuk menampung mereka.

Sebanyak 391 pengungsi asal Rohingnya terdampar di NAD pada awal Januari lalu. Sebanyak 198 orang diantaranya terdampar di Idi Rayeuk, Kuala Idi, Aceh Timur, sementara 193 orang lainnya terdampar di Sabang (Republika Online)

B. EKONOMI :

1. Indonesia Selesaikan Investor Update Dalam Rangka Kenalkan GMTN

Indonesia menyelesaikan investor update yang meliputi lebih dari 120 investor internasional dunia pada tanggal 12 Februari 2009, dalam rangka memperkenalkan Program Global Medium Term Note Republik Indonesia (Program GMTN).

Keterangan tertulis Ditjen Pengelolaan Utang Depkeu di Jakarta, Jumat, menyebutkan, delegasi Republik Indonesia yang terdiri atas para pejabat senior dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia telah melakukan pertemuan dengan para manajer investasi, bank-bank, dan investor lainnya di London, New York, Boston, San Fransisco, Los Angeles, Singapura dan Hongkong.

Investor Update ini dilaksanakan untuk memperkenalkan Program GMTN menyampaikan informasi terkini mengenai profil kredit Indonesia. Program GMTN telah dibentuk pada tanggal 28 Januari 2009 yang ditujukan untuk penerbitan Surat Utang Negara Republik Indonesia dalam valuta asing di masa mendatang.

Investor Update ini memberikan informasi terkini kepada para investor mengenai dampak krisis ekonomi global terhadap Indonesia, kebijakan pemerintah menanggapi krisis ekonomi global, stimulus fiskal yang sedang diajukan dan rencana anggaran pembiayaan.

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan ketidakpastian atas kondisi pasar keuangan dunia, Investor Update disambut baik oleh pasar ditandai dengan banyaknya permintaan pertemuan dengan delegasi Republik Indonesia.

Kinerja Surat Utang Negara Republik Indonesia dalam valuta asing telah melampaui kinerja indeks surat utang negara lainnya pada pasar negara berkembang sejak dikeluarkannya pengumuman mengenai Investor Update pada tanggal 28 Januari 2009.

Barclays Capital dan UBS Investment Bank, sebagai Arrangers dalam Program GMTN ini, telah menyusun pertemuan-pertemuan tersebut di atas bagi Republik Indonesia.

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar, Republik Indonesia akan mempersiapkan penerbitan Surat Utang Negara berdenominasi dollar Amerika Serikat dalam Program GMTN setelah Investor Update berakhir dan proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat selesai dilakukan.(ANTARA)

2. Investasi Asing Terancam Anjlok

Investasi asing tahun ini terancam anjlok akibat melambatnya arus modal global. Krisis keuangan dunia menyebabkan negara-negara kaya mengalami kontraksi ekonomi, yang ujungnya berdampak pada rendahnya minat investasi ke luar negeri.

Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, arus modal swasta ke negara-negara berkembang saat ini hanya Rp170–180 miliar, jauh di bawah 2007 yang hampir Rp1.000 miliar. Ini, kata dia, akibat volume modal internasional turun menjadi tinggal seperlimanya, sehingga kondisi likuiditas saat ini menjadi langka.

"Arus modal dari pemerintah juga turun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR di Jakarta kemarin. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menuturkan, data tersebut dikutip dari survei lembaga keuangan internasional bernama The Institute of International Finance (IIF).

IIF memperkirakan arus global yang masuk sepanjang tahun ini hanya separuh dari rata-rata kondisi normal. Anggito melanjutkan, penurunan portofolio dan investasi di Indonesia bukan disebabkan kondisi fundamental dalam negeri.

"Tapi karena modal global lebih banyak masuk ke negara maju, yang kepentingannya untuk membiayai defisit,"terangnya. Dia mencontohkan beberapa negara yang banyak menyerap modal global untuk membiayai defisit anggaran adalah Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Sri Mulyani melanjutkan, pertumbuhan ekonomi AS sejak kuartal II/2008 masuk dalam zona negatif.

"Pertanyaannya sekarang, berapa lama dia ada di zona negatif ini,"kata dia. Volume perdagangan dunia, sambung Sri Mulyani, akan turun drastis akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi AS. Tahun lalu volume perdagangan dunia masih tumbuh sekitar 6,9%, sementara sampai Januari kemarin angkanya minus 2%.

Menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi penanaman modal asing (PMA) selama 2008 naik 43,8% menjadi Rp133,83 triliun dari Rp93,06 triliun. Realisasi PMA, menurut sektor pada tahun lalu,antara lain pada transportasi, gudang, dan komunikasi senilai USD8,53 miliar untuk 35 proyek.

Industri logam, mesin, dan elektronika USD1,28 miliar sebanyak 141 proyek. Industri kendaraan bermotor dan transportasi lain senilai USD756,2 juta untuk 47 proyek. Industri kimia dan farmasi USD627,8 juta sebanyak 42 proyek,serta perdagangan dan reparasi USD582,2 juta dari 375 proyek.

Adapun berdasarkan negara, nilai investasi dari Mauritius mencapai USD6,48 miliar untuk lima proyek, Singapura USD1,49 miliar untuk 184 proyek, Jepang USD1,366 miliar untuk 130 proyek, Inggris USD513,4 juta untuk 57 proyek,dan Malaysia USD363,3 juta untuk 74 proyek.(Koran Sindo)

3. Ministry proposes low duty on imported raw materials of textiles

The Industry Ministry has proposed a cut in duty on the import of raw materials of textiles to increase the competitive edge of the commodity.

"It is true we have proposed a cut in duty on the import of raw materials of textile products which have strong market such as batik," Industry Minister Fahmi Idris said at a working meeting with the House of Representatives (DPR) Commission VI here on Thursday.

He said Indonesia`s textile products which had good competitiveness in the global market were among the commodities affected by the current global financial crisis.

"So, it is necessary to seek a solution to the matter. And lowering duty on the import of raw materials is one of the solutions," he said.

Textiles and textile products are one of the country`s main foreign exchange earners.(ANTARA)

4. Govt to focus on fishery diversification

The Ministry of Marine Affairs and Fisheries plans to increase the volume of processed fishery product exports up to 25 percent of total fisheries production in order to increase the value of exports.

The ministry`s director of foreign marketing Saut P. Hutagalung said on Thursday that the large increase, from 7 to 8 percent previously, would also be followed by diversification of export markets.

"We are focusing on improving the quality of processed products which are more valuable," Saut said at the sideline of the ministry`s national coordination meeting.

Compared to raw fishery products, the processed products are more valuable in terms of prices and it can also absorb new employment, Saut said. He added that processed fish products like fish fillets and battered shrimps can absorb more employment as these need people who to be available for processing.

The ministry is targeting production of 4 million tons of processed fishery products out of total annual production of 12.73 million tons in the industry. Ministry data shows that from 2007 to 2008, the volume of exports increased by 4.89 percent, from 854,328 tons to 896.140 tons. However, at the same time the export value increased by 14 percent, from US\$2.26 billion in 2007 to \$2.57 billion in 2008.

The ministry`s short and mid term plan targets 9 percent growth in export value this year, amounting to \$2.8 billion. The growth target is slower than the growth from 2007 to 2008.

The ministry hopes to increase the total fisheries workforce to just over ten million employees this year, while also planning to increase the average income of fishermen and fisheries workers to Rp 1.5 million per month, empowering 850,000 poor people living in coastal areas.

In order to cope with the slowing global demand, the ministry is also planning to diversify its export markets to the Middle-East, and Central and Eastern Europe. "Demand in our biggest markets, the United States, European Union, and Japan, has decreased around 10 to 15 percent, that`s why we need to look for new potential markets," Saut said.

The ministry data shows that in 2008, Indonesia`s fishery products export value to the Middle-East reached \$40 million, including exports to Saudi Arabia (\$18 million), Jordan (\$15 million), and Egypt (\$7 million). The Ministry is planning to increase exports to this area by 60 to 70 percent this year.

The data also shows that Indonesia`s fish products exports to the Eastern and Central Europe in 2007 reached to \$12 million. Marketing research conducted by the ministry in 2008 revealed that there also would be a lot of opportunities for Indonesian fish products in the United Arab Emirates and Poland.

The United States, European Union and Japan are still the biggest importers of Indonesian fishery products, reaching 65 to 70 percent, followed by East Asia (Taiwan, Korea, China, Thailand, Singapore, Malaysia) which contribution reached to 24 percent.

Saut said that Indonesia`s main commodities are shrimps and tuna fish. Last year, shrimp exports contributed \$1.2 billion or almost 50 percent out of the value of total exports, which reached \$2.56 billion

Diversification of products is also one of the ministry`s strategies to increase export value. "Less popular commodities like patin fish (*Pangasius Sutchi*), and milkfish are in more demand in the Middle East and Central Europe, especially patin which can be use as a substitute for cod fish," Saut said.

The ministry`s 2009 targets also include to increase domestic fish consumption to 30.17 kilograms of fish per capita per year, improve coastal regencies and cities into integrated coastal

areas, and increase fishery and maritime sector's contribution to the gross domestic income.(The Jakarta Post)

5. Pemerintah Tak Akan Intervensi Blok Natuna

Pemerintah tidak akan mengintervensi tim yang dibentuk Pertamina dalam mencari partner kerja sama yang pantas untuk mengelola tambang gas di Blok Natuna D Alpha setelah kontrak kerja samanya dengan ExxonMobil diputus tahun 2007 lalu.

"Sejak tahun 2007 pemerintah telah menghentikan kontrak Exxon di Natuna, karena dinilai tidak tepat untuk dilanjutkan lagi," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Kamis (12/2) sore, usai memimpin rapat di kantor pusat PT Pertamina, Jakarta.

"Tadi juga dilaporkan soal kasus Natuna. Saudara-saudara masih ingat, tahun 2007 telah saya putuskan untuk menghentikan kontrak dengan Exxon, karena kita nilai tidak tepat untuk dilanjutkan, dan kita tunjuk Pertamina dengan benderanya menjadi tuan rumah untuk pengembangan gas di Natuna itu," ujar Presiden SBY.

Selanjutnya Presiden memberi catatan, bahwa karena besar investasinya dan teknologinya juga menggunakan teknologi yang bisa mengatasi kandungan karbon dioksida yang tinggi, maka Pertamina tentu memerlukan partner.

"Saya berharap, partner kerja sama tersebut merupakan perusahaan yang betul-betul punya manajemen baik, punya kemampuan teknologi dan memiliki *track record* yang tinggi," kata Presiden.

Presiden mengakui investasi yang diperlukan untuk mengembangkan kilang gas di Natuna tersebut sangat besar. Hal ini terkait dengan kebutuhan adanya teknologi yang bisa mengatasi kandungan karbondioksida yang tinggi di Blok tersebut.

Presiden berharap, seleksi partner Pertamina tersebut berjalan dengan akuntabel. "Jangan ada protes yang *nggak* semestinya. Saya ingin semua bersih. Sehingga negara tidak dirugikan dan Pertamina bisa memperoleh pendapatan yang layak," katanya.

Menyangkut pembangunan tiga kilang minyak di Banten, Tuban, dan Balongan, menurut Presiden akan diupayakan untuk segera dibangun demi memenuhi permintaan minyak dalam negeri dan mengurangi impor. Diakui juga ada beberapa kendala dalam pembangunan ketiga kilang tersebut. Kendala-kendala terkait margin yang kecil dari pembangunan ketiga kilang tersebut sehingga mengurangi minat investor. "Perlu dilakukan *cost* restrukturisasi yang tepat, termasuk pemberian insentif pajak," jelas Presiden.

Sementara, tambah Presiden, bila pembangunan dilakukan sendiri oleh Pertamina, akan mengurangi deviden BUMN tersebut. "Tadi ada usulan agar setoran deviden Pertamina kepada pemerintah dikurangi bila pembangunan ketiga kilang tersebut dilakukan sendiri oleh Pertamina," kata Presiden

Presiden menekankan pentingnya pembangunan ketiga kilang tersebut, karena kapasitas kilang yang ada saat ini tidak bisa memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Akibatnya Indonesia harus mengimpor BBM dari luar negeri. "Saya minta departemen terkait dan Pertamina membahas masalah kilang ini secara serius dan menyusun *timeline* yang ketat dan tepat," tegas Presiden.

Menyangkut kemungkinan harga BBM kembali diturunkan karena semakin menurunnya harga minyak dunia, menurut Presiden, harga BBM saat ini sudah sesuai dengan kondisi sekarang.

Menurut Presiden, penurunan minyak mentah dunia saat ini tidak dipicu dari sisi fundamental, tetapi lebih dipicu oleh perekonomian Amerika Serikat yang belum jelas terkait *bail out* selain belum ada tanda-tanda berakhirnya resesi di negara Eropa.

"Berdasarkan kondisi tersebut, harga BBM saat ini sudah tepat. Namun pemerintah tetap akan memantau perkembangan kondisi dan perkembangan baru untuk kita melakukan evaluasi dan penyesuaian," ujar Presiden.

Presiden juga menjelaskan, jenis BBM yang harganya masih dalam pengawasan pemerintah adalah premium, solar, dan minyak tanah merupakan tiga komoditas di mana pemerintah masih mengeluarkan subsidi yang tidak sedikit," katanya.(Jurnal Nasional)

C. SOSBUD

:

1. "UE Ban" Dicabut Maskapai Indonesia Langsung ke Eropa

Departemen Perhubungan (Dephub) mengumumkan, jika pelarangan terbang Uni Eropa (UE Ban) atas seluruh maskapai Indonesia dicabut pada Maret tahun ini, maka maskapai Indonesia bisa langsung terbang ke Eropa.

"Perjanjian bilateral udara antara Indonesia dengan negara-negara Eropa bisa langsung diimplementasikan," kata Direktur Angkutan Udara, Dephub, Tri Sunoko saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Penegasan tersebut, terkait dengan pernyataan Wapres Jusuf Kalla saat berkunjung ke Den Haag Belanda beberapa waktu lalu bahwa PT Garuda Indonesia diharapkan bisa terbang atau melayani kembali rute Jakarta-Belanda mulai Juni 2009.

"Garuda diharapkan bisa terbang ke Belanda, Juni tahun ini. Tentu, setelah pelarangan terbang Uni Eropa atas maskapai Indonesia sudah dicabut," kata Jusuf Kalla.

Masalahnya sekarang, kata Tri, maskapai nasional belum memiliki pesawat untuk terbang ke Eropa sehingga realisasi penerbangan ke Eropa, termasuk Amsterdam Belanda, masih perlu waktu untuk pengadaan pesawatnya.

"Kalau Garuda bisa lebih cepat memiliki pesawat yang sesuai, silahkan saja. Juni atau kapan pun lebih baik," katanya.

Sejak pelarangan terbang Uni Eropa pada Juli 2007, Garuda tidak boleh terbang ke Eropa, khususnya ke bandara Schipol, Amsterdam.

Wapres sebelumnya menjelaskan bahwa pada saat keluarnya larangan penerbangan ke Eropa terdapat 68 poin yang harus diperbaiki oleh PT Garuda Indonesia. Namun saat ini tinggal 10 poin lagi yang harus diperbaiki.

"Itu bagus sebagai introspeksi diri kita. Sepuluh poin yang tersisa bisa kita selesaikan dalam dua bulan ini," kata Wapres.

Sementara untuk mengantisipasi hal tersebut, tambah Wapres, pihak Garuda saat ini sedang mempersiapkan diri. Wapres mengatakan Garuda saat ini sedang melakukan pembelian beberapa pesawat untuk melayani rute Jakarta-Amsterdam.

"Sebenarnya ada untungnya juga, kalau diperbolehkannya kemarin kita belum punya uang dari mana beli pesawatnya. Kalau sekarang, harga pesawat lagi murah (turun) jadi kita bisa beli," kata Wapres berkelakar.

Masyarakat Indonesia di Belanda sangat mengharapkan Garuda bisa lagi membuka penerbangan rute Jakarta-Amsterdam untuk melayani mereka yang ingin melakukan perjalanan ke Eropa. (ANTARA)

D. HANKAM :

1. Pengamanan: Kawasan Perbatasan Terbelenggu

Penanganan kawasan perbatasan terbelenggu dalam dilema di antara dua masalah, yaitu kesejahteraan masyarakat setempat (prosperity) dan keamanan (security). Sementara itu, di lapangan, polisi tidak dapat secara hitam putih menegakkan hukum dalam kondisi kesejahteraan masyarakat yang sangat timpang jika dibandingkan dengan negara tetangga di perbatasan. Sarana atau fasilitas pendukung kehidupan suatu masyarakat nyaris tak terpenuhi dari negeri sendiri.

Hal itu terungkap dalam diskusi pada hari kedua Rapat Koordinasi Pengamanan Wilayah Perbatasan yang diselenggarakan National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/2).

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Andi Masmiyat mengungkapkan, dalam hal illegal trading atau penyelundupan bahan kebutuhan pokok, polisi tidak dapat hitam putih menegakkan hukum. Menurut Andi, pendekatan hukum positif akan berdampak yang tidak manusiawi terhadap masyarakat setempat.

"Kalau rakyat bisa dapat pasokan gula, gas, dan beras lebih murah dari Malaysia, kita tidak bijak rasanya jika menghukum. Sementara untuk memperolehnya dari dalam negeri sendiri mahal luar biasa di ongkos karena buruknya infrastruktur ke kawasan perbatasan," tutur Andi.

Ia mencontohkan Desa Krayan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Desa itu hanya bisa dicapai melalui jalur udara. Banyak kebutuhan hidup warga di sana terpenuhi dari Sarawak. Hasil bumi rakyat Krayan, berupa beras yang terkenal pulen, dijual ke Malaysia atau Brunei ketimbang ke Tarakan atau daerah lain di Kalimantan. Penyebabnya, ongkos yang amat tinggi membuat petani dan pedagang merugi.

"Dalam kondisi yang masih seperti itu, prioritas kesejahteraan masyarakat lebih dikedepankan," kata Andi.

Hal senada sebelumnya diungkapkan Kepala Polda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal (Pol) Erwin TP Lumban Tobing. Disparitas harga bahan kebutuhan pokok yang tinggi membuat masyarakat kawasan perbatasan sangat bergantung kepada Malaysia. Terlebih, infrastruktur akses mobilitas di kawasan perbatasan Indonesia masih sangat minim atau buruk. Begitu pula dengan sarana telekomunikasi.

Minim fasilitas

Dalam kondisi seperti itu, kualitas sistem pengamanan di perbatasan juga turut terpengaruh secara negatif. Aparat yang ditempatkan di perbatasan juga turut terbelenggu dalam kondisi yang serba minim.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen (Pol) Halba Rubis Nugroho mencontohkan, fasilitas, khususnya telekomunikasi, untuk pengamanan di perbatasan sangat tak memadai. Selain itu, jumlah perwakilan Polri di negara tetangga juga masih minim. Padahal, peran perwira penghubung (liaison officer/LO) sangat besar untuk menangani berbagai masalah hukum yang menimpa WNI di negara tetangga.

Perwira Polri di Kuching, Malaysia, Komisariss Hendra Wirawan, mengatakan, dalam penanganan perdagangan manusia, misalnya, Polisi Diraja Malaysia dapat intensif bekerja sama dengan LO Polri secara langsung setiap saat.

Pendamping korban perdagangan manusia yang juga Direktur Anak Bangsa Arsinah Sumetro mengatakan, peran LO Polri di negara tetangga teramat diperlukan tak hanya untuk membongkar kejahatan, tetapi juga untuk melindungi korban.

"Sindikatis perdagangan manusia tak segan-segan melukai dan membunuh korban yang berontak. Justru di negara tetangga yang paling banyak masalah seperti Malaysia, perlu lebih banyak LO," kata Arsinah.

Sejumlah pos perbatasan justru terabaikan bertahun-tahun di wilayah Indonesia. Berdasarkan pantauan Kompas sejak 2005 hingga 2008, di wilayah Lundu-Biawan, Sarawak, yang berbatasan dengan Sajingan, Kabupaten Sambas, sudah tersedia fasilitas custom, immigration and quarantine (CIQ) lengkap. Petugas Kastam (Bea dan Cukai Malaysia) dan Polisi Diraja Malaysia menjaga kawasan itu.

Di wilayah Indonesia, sebuah pos perbatasan yang ada sudah nyaris roboh karena ditumbuhi semak belukar. Hanya ada peleton pengamanan TNI dengan sarana minim berpatroli di kawasan tersebut. Kondisi serupa terjadi di Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, yang berbatasan dengan Bakalalan di Distrik Limbang, Negara Bagian Sarawak.

Warga Bakalalan di Kalimantan Timur yang umumnya didominasi suku Dayak Lundayeh, disebut juga Suku Murut, memiliki sarana transportasi memadai. Sebaliknya, warga Lundayeh di wilayah Krayan hidup miskin dan kesulitan transportasi karena tidak ada akses di tengah hutan dataran tinggi jantung Pulau Kalimantan.

Malaysia

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Malaysia Da'i Bachtiar dalam perbincangan dengan Kompas menuturkan, dari semua kawasan perbatasan dengan 10 negara tetangga, masalah yang paling kompleks adalah kawasan perbatasan dengan Malaysia. Secara geografis, panjang perbatasan dengan Malaysia merupakan yang terpanjang, yakni 2.008 kilometer, dari ujung Aceh hingga Kalimantan Barat.

"Dalam soal pengamanan perbatasan, pos-pos bersama harus lebih diefektifkan dan memang perlu pos-pos tambahan lagi," kata Da'i.

Ia menambahkan, pemerintah daerah di kawasan perbatasan juga harus lebih peduli dengan fenomena di masyarakatnya. Contohnya, fenomena warga setempat yang mencari kerja ke Malaysia.

Da'i mengingatkan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sistem pengamanan di kawasan perbatasan sudah sangat mendesak, mengingat tren kejahatan makin berkarakter lintas negara.

Namun, dukungan pengamanan itu juga harus paralel dengan peningkatan kesejahteraan rakyat setempat. Tanpa keduanya dilakukan paralel, kondisi kawasan perbatasan yang serba minim akan selamanya terbelenggu dalam dilema. (Kompas)

2. Bantu Identifikasi Korban Kebakaran, TIM DVI Polri Diberangkatkan ke Australia

PEMERINTAH Indonesia melepas enam personel tim Disaster Victims Identification (DVI) ke Australia, untuk membantu proses identifikasi terhadap jenazah korban kebakaran hebat di negara bagian Victoria.

Enam dari 20 personel Tim DVI pimpinan Kombes Pol dr Musaddeq Ishaq itu dilepas keberangkatannya oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Dahuri di Jakarta, Jumat (13/2).

Kapolri mengatakan, gelombang pertama Tim DVI berjumlah enam orang itu akan berada di Australia selama 20 hari, untuk kemudian diganti oleh gelombang kedua yang berjumlah enam personel pula, untuk membantu identifikasi jenazah yang sudah sulit dikenali.

"Secara keseluruhan keberadaan Tim DVI di Australia sesuai dengan kebutuhan. Kemana mereka akan dikerahkan, disesuaikan petunjuk dan kebutuhan pihak Australia. Jadi, masalah teknis ditentukan di sana," kata Bambang.

Ia menambahkan, pengiriman Tim DVI ke Australia sesuai dengan permintaan Pemerintah Australia ke Indonesia mengingat Polri memiliki tim DVI dengan spesifikasi khusus.

"Tim ini sudah lengkap, ada ahli patologi, ontologi, dan kemampuan untuk mendalami DNA jenazah," ujarnya.

Sementara secara terpisah, Ketua Tim DVI Kombes Pol Musaddeq mengatakan, mereka akan berada di Australia dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. "Kami berada di sana sampai tugas dinyatakan selesai, sampai proses identifikasi selesai. Sesuai ketentuan internasional setiap dua minggu personel DVI harus dirotasi," katanya.

Meski terjadi rotasi terhadap personel DVI, namun Musaddeq sebagai ketua tim tetap akan berada di Australia, ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menlu Hassan Wirajuda mengatakan, pengiriman TIM DVI Polri dan bantuan dana sekitar satu juta dolar AS merupakan bentuk simpati pemerintah Indonesia terhadap Australia yang tengah mengalami musibah. (Jurnal Nasional)

3. Keberangkatan KRI Diponegoro ke Libanon Ditunda

Keberangkatan KRI Diponegoro-365 ke Libanon untuk bergabung dalam Gugus Tugas Maritim (Maritime Task Force) PBB di Libanon Selatan (UNIFIL), terpaksa diundur mengingat belum lengkapnya proses administrasi.

Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/2), mengatakan, kelengkapan proses administrasi dimaksud terkait penggantian biaya operasional KRI Diponegoro oleh PBB. "Misalnya, jika kapal mengalami kerusakan dalam perjalanan Indonesia-Libanon apakah biaya perbaikannya menjadi tanggungan PBB atau tidak, itu masih dibahas antara TNI dan PBB," ujarnya, mencontohkan.

Sagom mengatakan, pihak TNI saat ini tengah mendata dan menghitung ulang seluruh dukungan yang diperlukan mulai dari kapal diberangkatkan hingga beroperasi di wilayah perairan Libanon Selatan dan kembali ke Indonesia. Setelah ada persetujuan terhadap kalkulasi administrasi oleh pejabat PBB yang ditunjuk dan dipastikan ada penggantian dari PBB maka kapal akan segera diberangkatkan ke Libanon, kata Sagom.

Semula KRI Diponegoro akan diberangkatkan ke Libanon pada Jumat (13/2), dari Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) TNI Angkatan Laut melalui upacara pemberangkatan ala militer yang dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso.

Sebelum diberangkatkan, tim inspeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, KRI Diponegoro TNI AL layak untuk dikirim ke Libanon Selatan guna bergabung dalam Satgas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Libanon Selatan (UNIFIL). Sebelum di inspeksi oleh tim PBB kapal Diponegoro telah menjalani pemeriksaan dan uji oleh tim Mabes TNI AL.

UNIFIL saat ini memiliki kekuatan pasukan berkisar 13.000 personel, yang terdiri dari pasukan darat dan pasukan laut. Pasukan darat terdiri dari dua sektor, yaitu sektor barat dan timur. Pasukan darat dan laut tetap dibawah kendali dari Force Commander UNIFIL yang saat ini dijabat Mayjen Claudio Graziano dari Italia.

Kemampuan personel dan perlengkapan yang akan dikirim dalam misi PBB, tentunya harus memenuhi standar yang diterapkan PBB. Hal ini untuk memudahkan PBB dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan baik sebelum *deployment* dan selama di daerah tugas.

Persyaratan minimal untuk kapal perang yang akan bergabung dalam MTF UNIFIL antara lain, mampu mengoperasikan/mengendalikan heli, mampu melaksanakan SAR, mampu melaksanakan RAS (Pengisian BBM di laut), memiliki fasilitas kesehatan kelas satu, dan memiliki *combat management system secara real time*. Selain itu mampu melaksanakan *self protection*, memiliki kemampuan mengidentifikasi kawan/lawan (IFF), memiliki berbagai jenis persenjataan serta mampu memberikan bantuan kepada Angkatan Laut Libanon.

Dengan keluarnya kelayakan sesuai standar PBB, maka kapal dengan 99 awak dijadwalkan berangkat ke Libanon pada 13 Februari dari Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Jakarta dan diperkirakan tiba Maret 2009 di Libanon Selatan. Di Libanon, KRI Diponegoro akan bergabung dalam Satuan Tugas Maritim (Maritime Task Force/MTF) UNIFIL dibawah Comander Task Force (CTF 448) dimana beberapa negara telah mengirimkan kapal perangnya seperti Prancis, Turki, Yunani, Italia, Spanyol, dan Jerman.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, mengatakan, kemungkinan kapal akan diberangkatkan ke Libanon pada akhir Februari 2009. "Yang jelas, kapal saat ini berada dalam kondisi siap untuk diberangkatkan dan dioperasikan di Libanon," katanya.(Media Indonesia)

E. HUKUM :

1. Indonesia to extradite pedophile suspects

Indonesia will extradite three pedophile suspects, including an Australian Roman Catholic priest accused of abusing young boys, officials said Friday.

Benny Mamoto, the deputy head of Interpol Indonesia, said the men are among six foreigners who will be repatriated in coming weeks.

Australian Charles Barnett, a priest accused of having sexual contact with six children between 1970 and 1994, was detained near the Indonesian capital, Jakarta, at the request of the Australian government.

Barnett, 67, worked as an English teacher and ran a clothing business in Indonesia for 12 years before he was picked up last year, officials at Interpol said. He will be escorted by police on a flight to southern Australia on Friday, Mamoto said.

A second pedophile suspect, Paul Callahan of Australia, will soon follow.

A third, Christian Burger of Switzerland, will serve a four-year prison sentence in France for pedophilia, Indonesian authorities said, without giving details.

Three other suspects are wanted on fraud or trafficking charges in South Korea, Iran and Australia. Iranian Hadi Ahmadi is said to have smuggled 900 migrants into Australia between 1999 and 2001.

Indonesia has an extradition treaty with Australia, but presidential decrees will be needed to deport the others.(The Jakarta Post)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. **Indonesia Sea Segera Dibentuk**

BADAN Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menggelar sidang pleno yang diikuti 12 instansi terkait. Di antara agenda sidang adalah membahas pembentukan Indonesia Sea and Coast Guard.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo AS mengatakan, ini adalah sidang pleno tahunan untuk mengevaluasi kinerja Bakorkamla dan langkah-langkah ke depan, termasuk arah pembentukan Indonesia Sea Coast Guard atau penjaga pantai.

"Pembentukan coast guard adalah amanat Undang- Undang (UU) No 17 Tahun 2008, jadi harus dijalankan," kata Widodo kepada wartawan didampingi Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla Laksamana Madya Budi Hardjo di Jakarta kemarin.

Mengenai hasil operasi Bakorkamla sepanjang 2008, Budi Hardjo mengatakan antara lain tiga kali menggelar kegiatan operasi secara terpadu dengan stakeholder dan berhasil menyelamatkan potensi kerugian sebesar Rp401,8 miliar.

Dalam operasi tersebut Bakorkamla menggunakan kapal Catamaran 12 meter dan dibantu pesawat pengintai maritim dari stakeholder. Kapal Catamaran dirancang sebagai kapal patroli baruserga dan menginduk pada kapal patroli besar.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo mengatakan, saat ini instansinya tengah menggodok peraturan pemerintah (PP) terkait dengan pembentukan coast guard tersebut. (Koran Sindo)

III. **ARTIKEL** :

1. **Keamanan Nontradisional (Oleh Anak Agung Banyu Perwita)**

Pada 27 Februari-1 Maret, para pemimpin ASEAN dijadwalkan bertemu di Thailand guna menandai berlakunya secara resmi Piagam ASEAN.

Hal ini menandai fase baru perkembangan ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang lebih matang. Selama ini ASEAN mengundang decak kagum banyak pengamat masalah internasional sebagai salah satu organisasi regional termaju di negara-negara berkembang.

Namun, tidak sedikit pula kritik yang diterima ASEAN yang berkisar masih terbatasnya kapasitas institusionalnya dalam mencapai visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Bangkok.

Perkembangan terkini dari berbagai isu keamanan nontradisional yang harus dihadapi ASEAN memiliki arti penting bukan saja bagi proses institusionalisasi ASEAN, tetapi juga mencakup mekanisme regional dalam menghadapi berbagai isu-isu keamanan nontradisional di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Pembahasan berbagai isu keamanan nontradisional ini juga akan mencakup berbagai kemungkinan solusi regional dan global sebagai upaya meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik keamanan.

Pada abad ke-21 ini, untuk mencapai tujuan kolektif regional, semua aktor negara dan non-negara harus berkolaborasi guna menghasilkan strategi kolektif regional sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif global.

Enam kelompok ancaman

Kolektivitas regional itu didasarkan pada kenyataan, ancaman keamanan regional dan global bersifat multisektor. Secara lebih spesifik berbagai ancaman yang kini dihadapi dunia dan khususnya Asia Tenggara dapat diklasifikasikan ke dalam enam kelompok ancaman.

Pertama, ancaman ekonomi dan sosial, termasuk kemiskinan, penyakit menular, keterbatasan akses pada pangan, dan degradasi lingkungan hidup. Hal ini, misalnya, tergambar jelas dengan maraknya penyakit flu burung dan pencegahan asap akibat kebakaran hutan di beberapa negara ASEAN.

Kedua, konflik antarnegara (interstate conflict). Kendati kecenderungan konflik ini di kawasan Asia Tenggara menurun secara signifikan, bukan berarti ancaman ini sama sekali hilang. Beberapa persoalan perbatasan antarnegara ASEAN yang belum terselesaikan tuntas, misalnya, dapat memicu ketegangan antarnegara, jika bukan konflik antarnegara, yang tinggi.

Ketiga, konflik internal (intrastate conflict) yang justru sejak berakhirnya Perang Dingin kecenderungannya kian meningkat. Ketegangan hubungan antara Malaysia dan Thailand,

misalnya, merupakan akibat dari berbagai masalah domestik yang berasal dari isu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kawasan Asia Tenggara masih menyimpan potensi besar bagi mengemukakan konflik internal. Masalah ini akan menjadi akut jika isu separatisme terus merebak di kawasan ini.

Keempat, penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Meski ancaman ini relatif kecil terjadi di Asia Tenggara, terlebih karena ASEAN merupakan kawasan bebas senjata nuklir (SEANWZ), bukan berarti kita dapat mengabaikan kemungkinan penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.

Kelima, terorisme yang terus menunjukkan eskalasi aktivitasnya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kawasan ini bahkan dipercaya menjadi salah satu tempat berkembang biaknya terorisme internasional.

Keenam, ancaman oleh organisasi kejahatan transnasional dalam bidang narkoba dan illegal human trafficking sebagaimana berkembang di beberapa negara ASEAN.

Rohingya, ujian ASEAN

Selain itu, negara-negara anggota ASEAN juga menghadapi persoalan rumit lain yang menunjukkan keterkaitan antara masalah politik (demokratisasi, hak asasi manusia), ekonomi, dan sosial.

Persoalan pengungsi Rohingya dari Myanmar yang kini menjadi isu sensitif di Thailand dan Indonesia menunjukkan betapa masalah internal di Myanmar akan menjadi ujian penting bagi ASEAN menjelang implementasi Piagam ASEAN. Akankah dan mampukah ASEAN menyelesaikan isu-isu seperti ini secara kolektif dan menyeluruh?

Berbagai isu itu akan memunculkan sebuah pemahaman tentang keberadaan "negara" sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan di atas dan keterlibatan peran aktor non-negara (kelompok masyarakat, individu) dalam memberikan kontribusinya bagi pencapaian keamanan pada tingkat komunitas.

Akan terdapat interaksi antara aktor negara dan non-negara serta upaya untuk tidak memisahkan antara ancaman keamanan tradisional dan nontradisional (reconciling traditional and nontraditional security issues).

Tujuan, tanggung jawab, dan strategi kolektif regional ini juga didasarkan pada tiga utama pilar lain yang mengasumsikan bahwa (1) segala ancaman yang dihadapi tidak lagi mengenal batas-batas tradisional negara, (2) semua ancaman bagi suatu kawasan dan dunia memiliki keterkaitan antara aspek militer dan nonmiliter, (3) berbagai ancaman itu harus diatasi secara simultan, baik dalam tataran nasional, regional, dan global.

Untuk itu, ASEAN memerlukan kemauan baru guna melakukan refleksi diri terhadap semua agenda dan kebijakan yang dihasilkan selama ini, termasuk mekanisme pengambilan keputusan di ASEAN. Mekanisme kerja sama regional ASEAN harus terus diperkuat.

Kegagalan dalam menjawab berbagai isu keamanan baru itu hanya akan mengganggu proses institusionalisasi ASEAN. Karena itu, ASEAN hanya akan mengalami kemajuan semu (pseudo-progress). Inilah tantangan dan masalah terbesar pelaksanaan Piagam ASEAN

ASEAN juga harus melepaskan sikap konservatif yang dimiliki selama ini dengan mengambil langkah lebih berani dan lebih inovatif. Ketidakmauan dan ketidakmampuan melakukan terobosan dalam pengambilan keputusan akan kian melemahkan manfaat Piagam ASEAN. (Kompas)

IV. LAIN-LAIN : Tidak Ada

V. EDITORIAL :

1. Perbatasan yang Merana

Kawasan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga—wilayah di darat dengan tiga negara dan di laut dengan 10 negara—hampir tak terurus.

Itulah kesimpulan Rapat Koordinasi Pengamanan Wilayah Perbatasan NKRI yang diselenggarakan oleh Biro Pusat Nasional (NCB) Interpol di Jakarta, 11-13 Februari ini. Brigjen (Purn) Agus Susarso, Ketua Komisi Teknis Pertahanan Dewan Riset Nasional, yang tahun lalu mengunjungi perbatasan, mengatakan, "Sepantasnya di Sei Kuning, Pulau Sebatik, dibangun

gerbang kokoh dan kibaran Merah Putih. Tapi yang ada hanya gardu kecil dari kayu kusam ditemplei tulisan "Welcome to Indonesia".

Di Kalbar, panjang perbatasan dengan Serawak 1.035 kilometer. Di Kaltim, panjang perbatasan Indonesia–Malaysia 1.895 kilometer. Di sana ditanam 700 patok perbatasan dan 30 pos penjagaan. Artinya, setiap pos harus menjaga perbatasan sepanjang 65 kilometer.

Wilayah negara yang besar itu memberikan kebanggaan dan peluang sekaligus amanah dan tantangan. Patok dan pos jaga di darat masih terlalu sedikit, demikian pula kapal patroli untuk mengawal perbatasan.

Ya, semua tampak kurang. Infrastruktur dan fasilitas komunikasi, seperti diakui Sekretaris NCB Brigjen (Pol) Halba Rubis Nugroho, sangat minim. Sebagai akibatnya, perbatasan kita menjadi porous atau gerowong, yang konsekuensinya lalu mudah diterobos.

Di darat, penyusup ilegal dengan bermacam-macam niat mudah masuk ke wilayah RI. Di laut, kelangkaan kapal patroli membuat sumber daya alam, dalam hal ini perikanan dan siapa tahu kekayaan bawah laut lainnya, jadi rayahan penjarah asing.

Agus Susarso menanyakan, di mana sebenarnya posisi perbatasan RI di antara berbagai prioritas bangsa? Mungkin kita masih fokus pada prioritas lain, mengapa rupiah yang terbatas harus dialokasikan untuk wilayah pinggiran yang jauh? Tapi apakah sudah kita pikirkan berapa peluang ekonomi yang hilang puluhan tahun? Lebih mendasar lagi, pernahkah kita pikirkan risiko keamanan atau kedaulatan negara?

Ketika tantangan makin serius, mencakup mulai dari terorisme, perdagangan manusia, narkoba, penyelundupan bahan bakar minyak, bahan pokok, senjata api, pembalakan liar, hingga perompakan, sudah waktunya kita teguhkan komitmen untuk mengurus perbatasan.

Berbagai pemangku kepentingan, mulai dari TNI, Polri, Depdagri, Deplu, hingga Departemen Kelautan dan Perikanan, selama ini mungkin sudah memberikan perhatian. Namun, perhatian tersebut tampaknya perlu lebih dikoordinasikan, dan selanjutnya dikonkretkan. TNI, dengan anggaran 0,7 produk domestik bruto, jelas tidak bisa sendirian.

Kita tegaskan, perbatasan bukan wilayah belakang yang dibiarkan kumuh tak terurus. Perbatasan adalah halaman depan simbol kehormatan kita. (Kompas)

Jakarta, 13 Pebruari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu